

ANALISIS OPERASI KEAMANAN LAUT OLEH SATGAS MARINIR LAUT NATUNA UTARA GUNA MENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA

Oleh :

Novan Noor Alam

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut
email: novannooralam86@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 3 Agustus 2025

Revisi, 10 September 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Keamanan Maritim,
Laut Natuna Utara,
Satuan Tugas Maritim,
Kedaulatan,
Strategi Pertahanan.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis operasi keamanan maritim yang dilakukan oleh Satuan Tugas Marinir Laut Utara Natuna (Satgas Marinir LNU) dalam mempertahankan kedaulatan dan menjaga stabilitas maritim di perairan. Dengan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam dengan personel militer Indonesia, pengamatan lapangan, dan studi dokumentasi peraturan serta laporan operasi. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema strategis dan memetakan hubungan antar aktor dan kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa kehadiran Satgas Marinir LNU secara signifikan berkontribusi pada penguatan kehadiran negara dan ketahanan regional, namun masih menghadapi tantangan seperti teknologi pengawasan yang terbatas, tumpang tindih wewenang institusional, dan tekanan dari kapal asing. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem komando terintegrasi, peningkatan kemampuan teknologi maritim, dan penguatan sinergi antarlembaga untuk memastikan efektivitas strategi pertahanan dan penegakan hukum di Laut Natuna Utara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Novan Noor Alam

Afiliasi: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

Email: novannooralam86@gmail.com

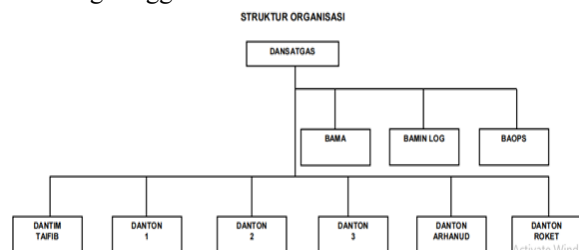
1. PENDAHULUAN

Pulau Natuna merupakan wilayah strategis Indonesia karena berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara serta berada di jalur perdagangan internasional penting dan kaya sumber daya alam (Novianto, Firmansyah, & Pratama, 2020). Letaknya yang rawan konflik menjadikannya pusat perhatian dalam dinamika politik dan hukum internasional. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI No. 9 Tahun 2020, wilayah ini termasuk dalam cakupan operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) untuk memperkuat pertahanan terintegrasi Tri Matra TNI. Konflik di Laut Natuna Utara dipicu oleh kepentingan negara-negara terhadap sumber daya laut dan posisi strategisnya. Wilayah ini menyimpan potensi minyak, gas, dan

perikanan yang signifikan. Klaim sepihak Tiongkok melalui *nine-dash line* sering memicu pelanggaran atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebagai respon, Indonesia membentuk embrio Satuan TNI Terintegrasi di Natuna pada Desember 2018 sebagai langkah awal pembentukan Kogabwilhan I (Novianto et al., 2020; Panglima TNI, 2020).

Satgas LNU bertugas menangkal pelanggaran ZEE, illegal fishing, serta kehadiran kapal asing, dengan fokus pada operasi amfibi, pertahanan pantai dan pangkalan (UU No. 34/2004; Kep Panglima TNI No. Kep/1312/XII/2018). Geografi Natuna yang sulit serta cuaca ekstrem menjadi tantangan, dengan gelombang laut mencapai 2–5 meter (BMKG, 2023). Strategi operasional adaptif sangat dibutuhkan untuk efektivitas pengamanan. Pembangunan kekuatan

militer di Natuna merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional menghadapi dinamika geopolitik, serta memperkuat simbol kedaulatan Indonesia di kawasan (Novianto et al., 2020). Satgas LNU, sebagai bagian dari kekuatan tangkal maritim, berperan penting menjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan militer dan diplomasi pertahanan berbasis teknologi tinggi.



Gambar 1 Orgas Satgas dan DSP

Sumber : Laporan Purna Tugas Natuna 2022 - 2023

Satgas Marinir Laut Natuna Utara (Satgas LNU), sebelumnya bernama Satgas Kompi Komposit Marinir TA 2022, dibentuk sebagai bagian dari pembinaan kemampuan tempur Marinir untuk memperkuat pertahanan perbatasan (Dankormar, 2021). Satuan ini terintegrasi dalam struktur STT Kogabwilhan I yang berfungsi sebagai pangkalan aju dan pusat operasi militer di Natuna (Perpres No. 10/2010). Keberadaan Satgas LNU menegaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman di Laut Natuna Utara, wilayah strategis yang rawan konflik (Novianto et al., 2020).

Satgas ini terdiri dari Rukoki, tiga peleton tempur, peleton bantuan, dan tim Taifib. Struktur ini memungkinkan fleksibilitas dalam patroli laut dan darat guna menangkal berbagai ancaman di wilayah tersebut (Pasmars 1 TNI AL, 2024). Dalam pelaksanaannya, patroli rutin memperlihatkan keseriusan TNI menjaga wilayah kedaulatan negara. Efektivitas operasi Satgas LNU tidak hanya ditentukan kekuatan tempur, melainkan juga oleh koordinasi dengan instansi sipil seperti Polri, KKP, dan Kemlu (Pelopor Wiratama, 2024). Dalam konteks ini, sinergi dan interoperabilitas menjadi kunci, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 10 Tahun 2010 (Republik Indonesia, 2010).

Komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan Laut Natuna Utara tercermin dari pengiriman Satgas Kompi Komposit Marinir Natuna IV pada akhir 2022. Sebanyak 130 personel dari Pasmars 1 dikerahkan untuk menjaga kawasan perbatasan yang strategis secara geopolitik (Pasmars 1 TNI AL, 2024). Penempatan Satgas ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi konflik lintas negara di Asia Tenggara.

Komposisi kekuatan terdiri dari unsur TNI AD (Kodim 0318, Yon Komposit, Polisi Militer), TNI AL (Guspurla, Lanal Ranai, Satgas Marinir), TNI AU (Lanud RSA, Skudron 52, Satrad 212, Denhanud 477), dan Polres Natuna, dengan total ratusan personel (Kasal, 2021). Struktur ini dilengkapi

elemen tempur seperti Kompi Zeni, Baterai Artileri, pelabuhan militer, hanggar UAV, Radar 212, dan fasilitas rumah sakit (Panglima TNI, 2018).



Gambar 2 Satgas LNU Sedang Beroperasi

Tantangan di Natuna meliputi *illegal fishing*, pelanggaran wilayah oleh kapal asing, dan aktivitas aktor non-negara. Menurut KKP, praktik *illegal fishing* merugikan nelayan lokal dan membahayakan ekosistem laut (KKP, 2024). Maka, pendekatan Satgas tak hanya militeristik tetapi juga preventif dan edukatif.

Satgas LNU bekerja sama dengan TNI AL, Bakamla, dan Ditjen PSDKP dalam patroli terkoordinasi. Hal ini merupakan wujud nyata dari sistem pertahanan terpadu negara (Republik Indonesia, 2010). Selain itu, patroli ini juga membantu memperkuat pengawasan terhadap *Zona Ekonomi Eksklusif*.

Posisi strategis Natuna yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka menjadikannya wilayah rawan. Penelitian ini menganalisis strategi operasi Satgas LNU dalam menjaga kedaulatan secara berkelanjutan (Hernawan, 2023). Fokus utamanya pada taktik operasi, dukungan teknologi, dan efektivitas koordinasi.

Strategi yang digunakan Satgas LNU dapat dikaji melalui kerangka *OODA Loop* dari John Boyd. Kerangka ini menekankan pengambilan keputusan cepat dan berbasis data (Goya, 2021). Pemanfaatan radar dan satelit menjadi krusial dalam proses observasi dan orientasi. Kesiapan logistik dan pelatihan personel juga menjadi faktor penting dalam respons cepat. Infrastruktur seperti dermaga dan jalur distribusi mendukung mobilitas pasukan dalam situasi darurat (Goya, 2021). Integrasi kemampuan teknis dan sosial sangat dibutuhkan dalam konteks keamanan maritim berbasis masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidisipliner menggabungkan aspek militer, sosial, dan ekonomi. Mengingat masyarakat Natuna mayoritas hidup dari laut, operasi keamanan harus selaras dengan aktivitas ekonomi lokal (BPS Natuna, 2024).

Dari sisi hukum, UNCLOS 1982 menjadi dasar klaim Indonesia atas ZEE di Laut Natuna. Namun, klaim tumpang tindih dari negara lain menuntut penguatan diplomasi dan pengawasan terintegrasi (United Nations, 1982). Oleh sebab itu,

peran Satgas LNU juga berkaitan dengan upaya penegakan hukum laut internasional.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Operasi Keamanan Laut oleh Satuan Tugas Marinir Laut Natuna Utara guna Menegakkan Kedaulatan Keamanan diwilayah Kepulauan Natuna.” Studi ini meneliti aspek taktik, efektivitas kerja sama sipil-militer, serta peran masyarakat dalam sistem keamanan laut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam strategi implementasi operasi keamanan laut oleh Satgas Marinir LNU di hinterland Pulau Natuna. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena keamanan maritim melalui studi kasus dan analisis kebijakan. Peneliti memfokuskan perhatian pada dinamika operasi, strategi pertahanan, serta dampaknya terhadap kedaulatan maritim dan keamanan masyarakat pesisir. Metode ini dinilai paling relevan untuk mengungkap konteks sosial, politik, dan strategis yang memengaruhi pelaksanaan operasi keamanan laut dalam lingkungan geopolitik yang kompleks.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung di lapangan, studi dokumentasi, serta penyebaran kuesioner terbatas kepada masyarakat pesisir. Informan kunci terdiri dari personel Satgas Marinir LNU seperti Mayor Marinir Afrison Tofik Chaniago, Letda Marinir Rondi, dan Mayor Marinir I Made Sudiantara, serta pejabat Lanal Ranai dan akademisi bidang studi maritim. Observasi dilakukan terhadap kegiatan operasional Satgas seperti patroli laut, pengawasan wilayah rawan pelanggaran, serta interaksi personel dengan masyarakat lokal. Dokumentasi diperoleh dari dokumen resmi TNI AL, peraturan perundang-undangan, serta laporan media terkait operasi keamanan maritim.

Dalam tahap pengolahan data, peneliti menggunakan perangkat lunak *NVivo* untuk membantu proses transkripsi, pengkodean (*coding*), dan analisis tematik dari data hasil wawancara dan dokumen. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola strategi operasional, tantangan pelaksanaan, serta efektivitas koordinasi lintas institusi. Teknik analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghasilkan interpretasi yang mendalam serta mendasarkan temuan pada bukti empiris yang terstruktur.

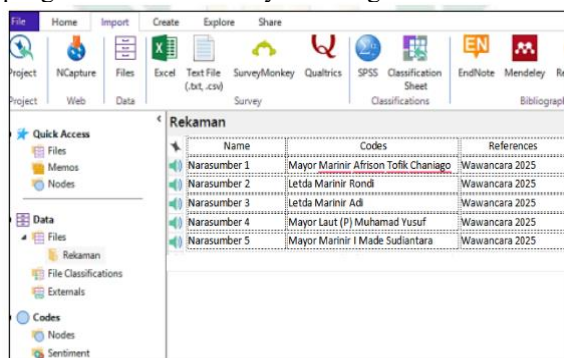
Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner dalam penelitian ini kemudian diolah menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis tematik. Untuk

mendukung proses pengolahan dan analisis data secara sistematis, digunakan perangkat lunak bantu *Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS), yaitu NVivo versi 12. Penggunaan NVivo bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manajemen data kualitatif serta memperkuat validitas dalam proses identifikasi tema dan pola dari data yang kompleks.

Langkah awal dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah proses *dekontekstualisasi*. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi satuan makna terkecil yang memuat sejumlah pengertian yang relevan terhadap fokus penelitian. Selain itu, dekontekstualisasi juga mencakup pengelompokan kalimat atau paragraf yang mengandung aspek-aspek penting yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini menjadi fondasi penting dalam analisis kualitatif, karena mampu memperlihatkan makna laten dan manifest dalam data.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam yang dianalisis menggunakan teknik pengkodean berulang. Proses ini dimulai dari transkrip hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai narasumber. Pengulangan pengkodean dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan reliabilitas data yang akan digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Penggunaan lebih dari satu transkrip membantu memperkaya konteks makna dan memastikan bahwa proses interpretasi dilakukan secara konsisten dan akurat.

Adapun wawancara dilakukan terhadap lima narasumber utama, yaitu Mayor Marinir Afrison Tofik Chaniago selaku Paban Ops Pasmars 1 sebagai delegasi dari Asisten Operasi Danpasmars 1 Kolonel Marinir Sri Utomo; Letda Marinir Rondi dan Letda Marinir Adi yang merupakan perwakilan dari Dansatgas Marinir Natuna V; Mayor Marinir Hendri Daniel Sirait; Mayor Laut (P) Muhamad Yusuf selaku Pasops Lanal Ranai; dan Mayor Marinir I Made Sudiantara selaku Dansatgas Marinir LNU VI sebagai delegasi dari Danlanal Ranai, Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto, S.Kel., M.M., CRMP. Kelima narasumber ini dipilih secara purposif karena memiliki pengalaman langsung dalam operasi pengamanan laut di wilayah strategis Natuna.

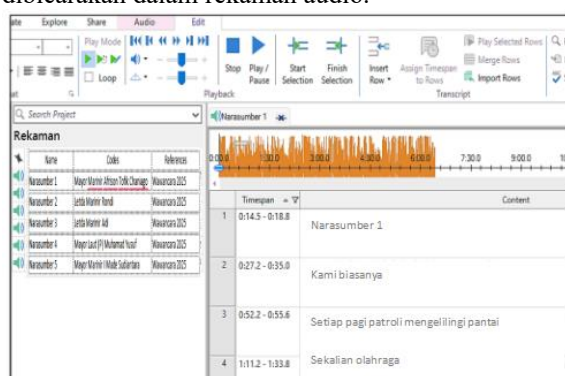


	Name	Codes	References
Narasumber 1	Mayor Marinir Afrison Tofik Chaniago		Wawancara 2025
Narasumber 2	Letda Marinir Rondi		Wawancara 2025
Narasumber 3	Letda Marinir Adi		Wawancara 2025
Narasumber 4	Mayor Laut (P) Muhamad Yusuf		Wawancara 2025
Narasumber 5	Mayor Marinir I Made Sudiantara		Wawancara 2025

Gambar 3 Import Audio Wawancara

Pada Gambar 4.1, setelah data audio hasil wawancara diimpor ke dalam perangkat lunak NVivo, data tersebut disimpan dalam *folder* yang diberi nama Rekaman. Penamaan ini bertujuan untuk memisahkan data hasil wawancara dari data lain yang mungkin akan ditambahkan di kemudian hari, sehingga tidak terjadi pencampuran antar berkas dalam folder tersebut.

Selanjutnya, hasil wawancara dari kelima narasumber yang telah berhasil diimpor ke dalam NVivo ditranskrip secara manual dan berurutan menggunakan fitur yang tersedia dalam perangkat lunak tersebut. Setelah proses transkripsi selesai, file audio wawancara diputar kembali dan hasil transkrip dibaca ulang secara teliti untuk memastikan bahwa isi transkrip benar-benar sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam rekaman audio.

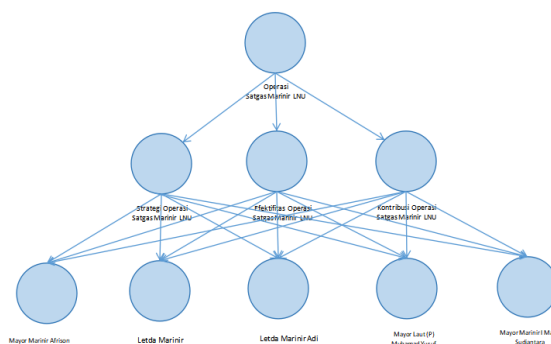


Gambar 4 Proses Transkrip Audio Wawancara

Tahap selanjutnya adalah proses rekontekstualisasi, yang bertujuan untuk meninjau kembali unit makna yang telah dikelompokkan sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan membaca ulang seluruh isi transkrip untuk memastikan bahwa setiap aspek konten telah tercakup dan memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Burnard (1991), teks dibaca ulang secara menyeluruh untuk mengidentifikasi satuan makna. Teks yang tidak ditandai pada tahap awal harus dievaluasi kembali: apabila teks tersebut memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, maka teks tersebut wajib dimasukkan ke dalam proses analisis.

Hasil transkrip dianalisis secara mikro, dimulai dengan memecah isi wawancara ke dalam unit-unit makna berdasarkan kalimat demi kalimat melalui proses pengkodean sederhana (*simple coding*), yang kemudian diidentifikasi dan dikategorikan menggunakan NVivo. Dalam penelitian ini, terdapat tiga node utama yang dijadikan kategori analisis, yaitu: *Strategi Operasi Marinir LNU*, *Efektivitas Operasi Marinir LNU*, dan *Kontribusi Operasi Marinir LNU*.

Masing-masing kategori ini menjadi dasar dalam proses wawancara kepada seluruh narasumber, untuk menggali kedalaman informasi sesuai fokus tematik yang telah ditentukan.



Gambar 5 Mind Mapping Triangulasi

Untuk meningkatkan keandalan temuan, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen kebijakan. NVivo juga mempermudah proses *memoing*, yaitu pencatatan refleksi analitis selama proses pengodean berlangsung, yang berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan narasi dan argumentasi penelitian. Validasi temuan dilakukan melalui *member checking* dan *peer debriefing*, memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dengan bantuan NVivo, proses analisis data menjadi lebih transparan, tertelusur, dan sistematis, sekaligus meminimalkan potensi bias subjektif dalam interpretasi data kualitatif. Keseluruhan tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan narasi yang mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas, tantangan, dan kontribusi operasi Satgas Marinir LNU dalam menegakkan kedaulatan maritim Indonesia di wilayah strategis Laut Natuna Utara.

Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas strategi operasi keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satgas Marinir LNU. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan implementasi teknis di lapangan, tetapi juga menyoroti aspek strategis dan kebijakan yang membentuk operasi tersebut. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan pertahanan maritim Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, kami akan membahas hasil analisis terkait dengan strategi, efektivitas operasional, dan kontribusi individu serta kolektif dalam operasi Satgas Marinir Laut Natuna Utara (Satgas LNU). Menjaga kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara menjadi tantangan besar mengingat posisi geografisnya yang strategis di Selat Karimata dan Laut China Selatan, yang merupakan jalur pelayaran internasional. Strategi yang diterapkan oleh Satgas LNU dalam menjaga kedaulatan ini sangat berkaitan dengan konsep Sea Power yang menekankan penguasaan atas wilayah laut sebagai kunci stabilitas ekonomi dan militer. Keberhasilan operasi Satgas LNU, seperti yang

diungkapkan oleh para pejabat terkait, sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam konteks efektivitas operasional, analisis menunjukkan bahwa Satgas LNU telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam mengamankan wilayah laut, meskipun menghadapi berbagai tantangan operasional seperti keterbatasan logistik dan sumber daya. Teori efektivitas Richard M. Steers, yang menilai organisasi berdasarkan pencapaian tujuan, proses internal, dan hubungan dengan pihak-pihak terkait, memberikan kerangka untuk mengevaluasi hasil yang dicapai oleh Satgas LNU. Patroli rutin, respons cepat terhadap ancaman, dan penggunaan teknologi yang efisien menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan operasional Satgas LNU. Namun, tantangan tetap ada, dan Satgas LNU harus terus beradaptasi dengan dinamika operasional yang berkembang.

Kontribusi individu dan kolektif dalam Satgas LNU juga memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan operasional. Penerapan teori kontribusi oleh Stephen P. Robbins menunjukkan bahwa kontribusi individu diukur tidak hanya dari kehadiran fisik, tetapi juga dari pencapaian hasil yang nyata, baik dalam patroli maupun pengamanan wilayah laut. Sistem evaluasi kontribusi yang diterapkan dalam Satgas LNU mendukung pengembangan karier personel dan memotivasi mereka untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas. Keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan dan sistem rotasi tugas turut meningkatkan motivasi personel untuk berkontribusi lebih maksimal dalam operasi ini. Dengan adanya sinergi antara individu, tim, dan organisasi, Satgas LNU berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan operasional tidak hanya bergantung pada faktor teknis, tetapi juga pada kerja sama dan semangat kolektif dalam menghadapi tantangan yang ada.

Strategi Satgas Marinir Laut Natuna Utara dalam Menjaga Kedaulatan Maritim Indonesia

Strategi Satgas Marinir Laut Natuna Utara dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia sangat terkait dengan kekuatan laut sebagai instrumen penting dalam pertahanan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI AL memiliki tugas utama untuk mengamankan wilayah laut Indonesia dari ancaman eksternal. Alfred Thayer Mahan dalam teorinya tentang *Sea Power* menegaskan bahwa negara yang menguasai laut akan memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi dan militer (Mahan, 1890). Dalam konteks ini, Laut Natuna Utara yang berada di kawasan strategis antara Selat Karimata dan Laut China Selatan memegang peranan kunci dalam menjaga stabilitas kawasan, baik secara regional maupun global.

No	Node	Tema/Kategori	Sumber	Kode Awal
1	Strategi Satgas	Strategi Pertahanan	UU No. 34/2004	Strategi Maritim; Sea Power

	Marinir LNU	Maritim		
2	Strategi Satgas Marinir LNU	Geostrategis Laut Natuna	Mahan (1890)	Stabilitas Kawasan; Posisi Strategis
3	Strategi Satgas Marinir LNU	Kebijakan Pertahanan Laut	Rondi (2024)	Pulau Terluar; Titik Strategis
4	Strategi Satgas Marinir LNU	Operasionalisasi Satgas	Observasi Lapangan	Pos Pantau; Latihan Rutin
5	Strategi Satgas Marinir LNU	Kolaborasi Antarinstansi	Yusuf (2025)	Koordinasi Maritim; Kolaborasi Lintas
6	Strategi Satgas Marinir LNU	Integrasi Pengawasan Maritim	Yusuf (2025)	Tiga Matra; Pengawasan Terpadu
7	Strategi Satgas Marinir LNU	Pengamanan Laut	Sudiantara (2025)	Patroli; Kesiapsiagaan Laut
8	Strategi Satgas Marinir LNU	Perlindungan ZEE dan Penegakan Hukum	Adi (2024)	Illegal Fishing; Kedaulatan ZEE
9	Strategi Satgas Marinir LNU	Sea Power & Ketahanan Maritim	Mahan (1890)	Sea Power Indonesia
10	Strategi Satgas Marinir LNU	Pilar Kedaulatan Maritim	Simpulan Penulis	Pilar Laut; Implementasi Strategi

Sumber : Diolah oleh Penulis dengan NVivo, 2025

Laut Natuna Utara, sebagai wilayah yang terletak di jalur pelayaran internasional, memberikan Indonesia keunggulan dalam proyeksi kekuatan laut. Letda Marinir Rondi menjelaskan bahwa Natuna bukan hanya pulau terluar, tetapi juga merupakan titik penting dalam kebijakan pertahanan Indonesia yang dituangkan dalam Perpres No. 10 Tahun 2010 (Rondi, 2024). Oleh karena itu, Satgas Marinir Laut Natuna Utara dilengkapi dengan pos pantau sementara dan latihan rutin untuk memastikan pengawasan wilayah secara efektif. Keunggulan ini memungkinkan Indonesia untuk mengawasi potensi sumber daya alam maritim dan melindungi jalur pelayaran internasional dari ancaman yang mungkin timbul.

Sebagai bagian dari implementasi strategi, Satgas LNU tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk menjaga kedaulatan maritim. Koordinasi antara TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperkuat sistem pengawasan maritim yang lebih komprehensif dan efektif. Salah satu bentuk konkret dari integrasi ini adalah melalui koordinasi antara kekuatan permukaan, udara, dan intelijen, yang memperkuat mekanisme pengawasan di Laut Natuna Utara (Yusuf, 2025).

Selain itu, strategi Satgas LNU juga melibatkan patroli rutin dan latihan bersama dengan TNI AL, yang sesuai dengan instruksi militer yang berlaku. Mayor Marinir I Made Sudiantara menegaskan bahwa latihan dan patroli ini merupakan

bagian dari strategi pengamanan untuk menanggulangi berbagai potensi ancaman yang bisa merusak stabilitas wilayah maritim Indonesia (Sudiantara, 2025). Dengan cara ini, Satgas LNU dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan yang terjadi di laut, termasuk pelanggaran hukum seperti illegal fishing yang sering terjadi di kawasan tersebut.

Salah satu aspek utama dalam strategi pengamanan ini adalah dominasi atas Laut Natuna Utara, yang memungkinkan Indonesia untuk mengelola dan melindungi kawasan ekonomi eksklusif (ZEE) yang menjadi bagian vital dari sumber daya alam negara. Satgas LNU memiliki peran penting sebagai pelindung kawasan ini, sekaligus menegakkan hukum terhadap praktik illegal fishing dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal (Adi, 2024). Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kesiapan Satgas LNU dalam mendeteksi dan menanggulangi potensi ancaman yang dapat merusak kedaulatan maritim Indonesia.

Dengan segala upaya yang dilakukan oleh Satgas Marinir Laut Natuna Utara, konsep *Sea Power* yang diterapkan oleh Indonesia dapat dilihat sebagai refleksi dari ketahanan maritim yang semakin kuat. Satgas LNU, yang beroperasi dengan dukungan peralatan dan latihan yang rutin, berperan besar dalam mempertahankan kedaulatan negara di wilayah perairan yang strategis ini. Penguatan kebijakan pertahanan maritim Indonesia juga sejalan dengan visi strategis nasional yang menekankan pentingnya penguasaan wilayah laut untuk kepentingan ekonomi dan keamanan negara.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh Satgas Marinir Laut Natuna Utara berperan sebagai salah satu pilar utama dalam memastikan Indonesia tetap memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayah lautnya. Dengan adanya koordinasi yang solid antar instansi, dukungan dari TNI AL, serta implementasi strategi *Sea Power*, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang menguasai dan melindungi lautnya demi kepentingan nasional yang lebih luas.

Efektivitas Operasional Satgas LNU

Efektivitas operasional merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai keberhasilan suatu satuan militer. Dalam konteks Satgas LNU, teori efektivitas yang diperkenalkan oleh Richard M. Steers dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, proses internal organisasi, dan hubungan dengan pihak-pihak terkait. Steers (1985) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga dimensi utama: goal attainment, internal process, dan strategic constituencies. Penerapan teori ini dalam konteks Satgas LNU memungkinkan penilaian yang lebih holistik, yang tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga interaksi antar elemen yang terlibat dalam pengamanan wilayah Natuna. Dalam hal ini, efektivitas operasional Satgas LNU diukur melalui

hasil patroli, koordinasi antarinstansi, dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam menghadapi tantangan di lapangan (Chaniago, 2024).

No	Node	Tema/Kategori	Sumber	Kode Awal
1	Efektivitas Operasional Satgas LNU	Teori Efektivitas (Richard M. Steers)	Steers (1985), Chaniago (2024)	Goal Attainment, Internal Process, Strategic Constituencies
2	Efektivitas Operasional Satgas LNU	Keberhasilan Patroli Laut	Rondi (2024), Chaniago (2024)	Patroli efektif, Respons cepat, Koordinasi antarsatuan, Pelaporan digital
3	Efektivitas Operasional Satgas LNU	Sistem Pertahanan Semesta	Dokumen Operasional Satgas Komposit 2022	Taktik militer, Kolaborasi TNI AL & Bakamla, Keamanan personel dan material
4	Efektivitas Operasional Satgas LNU	Tantangan Logistik dan Sumber Daya	Chaniago (2024)	Titik suplai terbatas, Sistem distribusi bahan bakar, Shift overlapped
5	Efektivitas Operasional Satgas LNU	Adaptasi dan Perbaikan Proses	Letda Marinir Adi (2024)	*Learning organization*, Evaluasi rutin, Adaptasi strategi
6	Efektivitas Operasional Satgas LNU	Evaluasi Berkelanjutan dan Inovasi	Letda Marinir Adi (2024)	Penggunaan teknologi, Efisiensi sumber daya, Integrasi antarinstansi, Pengelolaan waktu dan tenaga
7	Efektivitas Operasional Satgas LNU	Penilaian Keberhasilan Operasional	Chaniago (2024), Adi (2024)	Evaluasi misi, Ketahanan organisasi, Kemampuan adaptif terhadap dinamika lapangan

Sumber : Diolah oleh Penulis dengan NVivo, 2025

Salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas Satgas LNU adalah keberhasilan patroli laut. Keberhasilan patroli tidak hanya dihitung berdasarkan frekuensi pelayaran, tetapi juga sejauh mana patroli tersebut mampu mencegah kapal asing yang mencoba masuk secara ilegal ke wilayah perairan Indonesia. Mayor Marinir Afrison Tofik Chaniago menegaskan bahwa indikator efektivitas ini mencakup kecepatan respons terhadap ancaman dan kualitas koordinasi antar satuan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas Steers, yang menyatakan bahwa proses internal yang efisien, seperti sistem patroli yang didukung oleh pelaporan digital yang akurat, berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi yang lebih cepat dan lebih efektif (Rondi, 2024). Dengan adanya sistem pelaporan digital yang mendukung keputusan operasional, Satgas LNU dapat merespons ancaman dengan lebih cepat dan tepat, sehingga mengurangi potensi pelanggaran kedaulatan maritim Indonesia.

Selain keberhasilan patroli, penerapan sistem pertahanan semesta yang total, terpadu, dan berkelanjutan menjadi aspek penting dalam efektivitas operasional Satgas LNU. Sistem ini tercantum dalam dokumen operasional Satgas Komposit Marinir Natuna TA. 2022, yang menunjukkan bahwa Satgas LNU tidak hanya berfokus pada teknik dan taktik militer, tetapi juga pada perencanaan yang matang dalam menjaga keamanan personel dan material. Sebagai contoh, perencanaan yang matang dalam melakukan patroli secara terkoordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI AL dan Bakamla, turut berperan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah. Proses internal yang terorganisir dan sistematis ini menunjukkan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kolaborasi antar lembaga yang memiliki kepentingan dalam menjaga kedaulatan maritim.

Namun, efektivitas operasional Satgas LNU juga dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah ketidakpastian yang muncul selama pelaksanaan operasi. Kendala ini meliputi ketergantungan pada sumber daya terbatas, seperti kapal pendukung dan titik suplai yang jauh. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan dalam hal logistik, terutama dalam distribusi bahan bakar dan perlengkapan operasional. Untuk mengatasi hal ini, Satgas LNU telah menerapkan sistem mitigasi yang inovatif. Salah satunya adalah pembangunan titik distribusi bahan bakar di pulau-pulau terluar yang terjangkau, serta penggunaan sistem shift overlapped untuk mengatasi keterbatasan personel yang terlibat dalam patroli.

Walaupun ada kendala dalam aspek logistik dan sumber daya, Satgas LNU tetap berusaha untuk beradaptasi dan mencari solusi yang lebih efisien dalam menghadapi tantangan operasional. Salah satu cara untuk memperbaiki efektivitas operasional adalah dengan mengadopsi prinsip *learning organization*, di mana setiap anggota Satgas LNU terus memperbaiki proses dan operasional berdasarkan pengalaman di lapangan. Dalam hal ini, keberhasilan Satgas LNU tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi canggih dan sumber daya yang ada, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki diri secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan yang dinamis dan tak terduga.

Penerapan prinsip *learning organization* dalam Satgas LNU juga tercermin dalam evaluasi rutin dan analisis setiap operasi yang dilakukan. Menurut Letda Marinir Adi (2024), setiap misi yang berhasil ataupun yang menghadapi hambatan selalu dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas operasional ke depannya. Hal ini memungkinkan Satgas LNU untuk belajar dari setiap pengalaman dan menerapkan langkah-langkah perbaikan dalam operasi selanjutnya. Evaluasi ini tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga

dengan integrasi antarinstansi dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, serta pengelolaan waktu dan tenaga yang lebih optimal dalam setiap misi.

Keberhasilan operasional Satgas LNU, dalam akhirnya, bukan hanya dilihat dari hasil patroli atau jumlah kapal yang diamankan, tetapi juga pada seberapa efektif mereka dalam mengelola proses internal, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta beradaptasi dengan kondisi lapangan yang selalu berubah. Keberhasilan Satgas LNU dalam menghadapi tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas operasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat dan efisien terhadap perubahan yang ada. Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi yang mendukung, Satgas LNU mampu mempertahankan efektivitas operasionalnya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Kontribusi Individu dan Kolektif dalam Operasi Satgas Marinir Laut Natuna Utara

Teori kontribusi yang dikembangkan oleh Stephen P. Robbins memberikan panduan yang jelas dalam menilai sejauh mana individu berperan dalam keberhasilan suatu organisasi. Dalam konteks Satgas Marinir Laut Natuna Utara (Satgas LNU), kontribusi individu tidak hanya diukur berdasarkan kehadiran fisik mereka, tetapi juga pada output yang dihasilkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mayor Laut (P) Muhamad Yusuf (2025), kontribusi individu diukur melalui hasil patroli dan keberhasilan dalam pengamanan laut sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Setiap personel diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi yang lebih besar. Ini sejalan dengan pandangan Robbins (2003) yang menjelaskan bahwa kontribusi individu dalam organisasi sangat bergantung pada sejauh mana pekerjaan mereka memberikan dampak langsung terhadap tujuan organisasi yang lebih luas.

No	Node	Tema/Kategori	Sumber	Kode Awal
1	Evaluasi Kinerja Individu	Penilaian berbasis hasil patroli, waktu pelaksanaan, dan feedback dari atasan	Yusuf (2025), Robbins (2003)	Evaluasi bulanan, performance-based assessment
2	Inovasi Taktis Personel	Kontribusi non-formal berupa ide dari pengalaman lapangan	Adi (2024)	Inovasi strategi patroli, penggunaan teknologi
3	Motivasi melalui Rotasi Tugas	Peningkatan motivasi dan keterampilan melalui variasi tugas	Yusuf (2025), Robbins (2003)	Job enrichment, pengembangan personel
4	Adaptasi terhadap Kondisi Lokal	Tantangan dan pembelajaran dari budaya lokal Natuna	Rondi (2024)	Exposure wilayah operasi, adaptasi budaya
5	Keterlibatan dalam Keputusan	Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan operasi	Sudiantara (2025)	Shared leadership, tanggung jawab kolektif
6	Pembelajaran Kolektif	Berbagi pengetahuan antar personel berdasarkan pengalaman	Seluruh narasumber	Transfer pengetahuan, efektivitas kolektif
7	Sinergi Tim dan Organisasi	Kerja sama antara individu dan satuan sebagai kunci keberhasilan	Robbins (2003)	Kolaborasi, solidaritas operasional
8	Efektivitas Operasional	Dampak kontribusi terhadap pencapaian tujuan Satgas LNU	Yusuf (2025), Adi (2024)	Kinerja satuan, keamanan wilayah

Sumber : Diolah oleh Penulis dengan NVivo, 2025

Sistem evaluasi kontribusi individu dalam Satgas LNU dilakukan melalui penilaian bulanan yang mencakup indikator seperti keberhasilan misi, waktu pelaksanaan, dan feedback dari atasan. Letda Marinir Rondi (2024) menjelaskan bahwa penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi administratif, tetapi juga sebagai dasar bagi pengembangan karier personel melalui rotasi dan promosi. Evaluasi yang berbasis kinerja ini sejalan dengan konsep *performance-based assessment* dalam teori kontribusi Robbins (2003), di mana kontribusi individu diukur berdasarkan pencapaian yang dapat diukur dan direkam dalam sistem evaluasi yang sistematis. Hal ini memungkinkan pimpinan Satgas LNU untuk memberikan pengakuan yang tepat dan merencanakan langkah-langkah pengembangan karier yang sesuai dengan kinerja yang telah ditunjukkan.

Selain kontribusi formal yang diukur melalui penilaian bulanan, kontribusi non-formal juga sangat dihargai dalam Satgas LNU. Inovasi taktis yang diajukan oleh personel, baik itu dalam hal strategi patroli atau penggunaan teknologi baru, sangat dihargai dan didorong dalam rapat evaluasi. Menurut Letda Marinir Adi (2024), ide-ide kreatif ini seringkali berasal dari pengalaman lapangan yang dihadapi oleh personel, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk tantangan yang ada. Penerimaan terhadap kontribusi non-formal ini mencerminkan pentingnya kreativitas dalam

mendukung operasi, serta membuka ruang bagi personel untuk memberikan masukan yang dapat memperbaiki efektivitas operasional secara keseluruhan.

Motivasi individu memainkan peran penting dalam mendukung kontribusi mereka terhadap keberhasilan operasional. Mayor Laut (P) Muhamad Yusuf (2025) mengungkapkan bahwa sistem rotasi tugas yang diterapkan dalam Satgas LNU dapat meningkatkan motivasi personel. Rotasi ini memberikan variasi tugas yang tidak hanya menghindarkan personel dari kejenuhan, tetapi juga memberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperkaya pengalaman. Robbins (2003) menyebut hal ini sebagai *job enrichment*, di mana variasi tugas memberikan kesempatan bagi personel untuk memperluas kemampuan mereka dalam berbagai kondisi operasional. Dengan sistem rotasi yang diterapkan, personel tidak hanya menjadi lebih terampil, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan baru dalam setiap misi.

Rotasi tugas juga memberi kesempatan bagi personel untuk beradaptasi dengan kondisi yang berbeda, seperti yang terjadi di wilayah Natuna. Letda Marinir Rondi (2024) menambahkan bahwa meskipun ada tantangan dalam beradaptasi dengan budaya lokal Natuna, rotasi tugas memastikan bahwa personel memiliki exposure yang lebih luas terhadap berbagai tugas operasional. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas tugas yang dijalankan dan memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, sebagaimana dijelaskan oleh Mayor Marinir I Made Sudiantara (2025), juga memberikan dampak signifikan pada semangat dan motivasi personel untuk berkontribusi secara maksimal dalam setiap operasi.

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan ini juga memberikan rasa kepemilikan terhadap hasil operasi. Personel yang merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan cenderung merasa lebih bertanggung jawab atas pencapaian hasil yang diinginkan. Keputusan-keputusan yang diambil bersama juga meningkatkan rasa solidaritas antar anggota satuan. Dalam hal ini, prinsip *shared leadership* yang diterapkan di Satgas LNU memungkinkan setiap individu untuk mengambil peran dalam berbagai aspek operasional, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi secara keseluruhan.

Keterlibatan personel dalam berbagai aspek operasional dan kontribusi kolektif sangat penting dalam menjaga kelancaran tugas Satgas LNU. Sinergi antara individu, tim, dan organisasi merupakan kunci dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini dapat dilihat dalam penerapan prinsip pembelajaran kolektif, di mana setiap anggota satuan terus berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk

meningkatkan efektivitas operasional. Pembelajaran kolektif ini sangat penting dalam konteks pengamanan kawasan yang penuh dengan dinamika dan tantangan yang tidak terduga, seperti yang sering terjadi di wilayah Natuna.

Sinergi dalam operasional Satgas LNU tercermin dalam pengelolaan pengetahuan yang berkelanjutan, di mana pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh oleh individu dalam patroli atau misi sebelumnya dibagikan dengan anggota lain. Pengetahuan ini sangat penting untuk mempersiapkan anggota Satgas menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman baru di perairan Natuna. Pembelajaran kolektif ini mendukung keberlanjutan efektivitas operasional karena dapat mengurangi kesalahan yang sama dan mempercepat waktu respons terhadap ancaman.

Dengan demikian, kontribusi individu dan kolektif dalam Satgas LNU membuktikan bahwa keberhasilan operasional tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kerja sama yang baik dan semangat kolektif dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Kontribusi individu yang diukur melalui evaluasi kinerja yang berbasis hasil, serta kontribusi non-formal yang mendorong inovasi, memberikan dampak positif pada efektivitas operasional. Selain itu, sistem rotasi tugas yang diterapkan dalam Satgas LNU juga berfungsi sebagai motivator untuk menjaga semangat personel, sementara pembelajaran kolektif memperkuat kemampuan satuan dalam mengatasi tantangan yang ada di lapangan. Semua elemen ini bekerja bersama untuk mencapai tujuan utama, yaitu menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Natuna dengan maksimal.

Diskusi

Kekuatan laut atau sea power merupakan elemen vital dalam menjaga kedaulatan sebuah negara, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Alfred Thayer Mahan dalam teorinya menekankan pentingnya kontrol atas laut untuk menciptakan dominasi global. Teori ini menjadi acuan penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, termasuk Laut Natuna Utara, yang merupakan salah satu kawasan strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), peran kekuatan militer laut sangat diutamakan dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk melalui penempatan Satuan Tugas Marinir (Satgas LNU) di kawasan tersebut. Kehadiran Satgas LNU merupakan implementasi langsung dari konsep sea power dalam strategi pertahanan Indonesia.

Laut Natuna Utara memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di pertemuan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, kawasan ini dikategorikan sebagai wilayah prioritas keamanan. Hal ini

menjadikan Laut Natuna Utara sebagai salah satu titik fokus pengamanan maritim Indonesia. Satgas LNU memainkan peran penting dalam menjaga wilayah ini dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing, pelanggaran batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan infiltrasi asing. Dengan demikian, penguatan sea power melalui pendekatan militer menjadi strategi yang efektif dalam membentuk efek pencegahan (deterrence) terhadap potensi ancaman yang ada.

Implementasi sea power oleh Satgas LNU juga tercermin dalam kebijakan pertahanan maritim nasional. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1312/XII/2018 tentang penguatan pertahanan pulau-pulau terluar dan perbatasan menunjukkan pentingnya kehadiran militer di kawasan seperti Natuna. Melalui patroli terjadwal, observasi udara, dan penindakan langsung terhadap pelanggaran, Satgas LNU berfungsi sebagai garda terdepan dalam pengamanan wilayah. Pendekatan ini selaras dengan teori Mahan tentang *forward presence*, di mana kehadiran militer yang aktif dapat menekan potensi eskalasi konflik di kawasan yang rawan.

Satgas LNU juga mengadopsi teori OODA Loop (Boyd, 1987) untuk merespons dinamika situasi di lapangan. Siklus Observe, Orient, Decide, Act menjadi landasan operasional yang memungkinkan Satgas untuk mengatasi ancaman secara efisien. Pada tahap observasi, Satgas LNU melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kapal asing dan aktivitas mencurigakan menggunakan radar, UAV, serta laporan dari masyarakat pesisir. Data yang diperoleh menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi potensi ancaman.

Kemampuan Satgas LNU dalam mengorientasikan situasi sangat menentukan efektivitas keputusan yang diambil. Orientasi yang akurat memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) TNI. Tahap pengambilan keputusan dilakukan melalui koordinasi antara komando atas dan satuan pelaksana di lapangan. Sistem komunikasi militer yang terintegrasi dan penggunaan peta taktis digital memastikan bahwa keputusan operasional dapat diterapkan secara cepat. Setelah itu, tahap tindakan yang meliputi manuver laut, penggerebekan, atau pengusiran kapal asing yang melanggar batas wilayah dilakukan untuk menegaskan kedaulatan negara.

Namun, implementasi OODA Loop juga dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan. Salah satu hambatan terbesar adalah ketergantungan pada otorisasi dari pusat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam situasi abu-abu (*gray zone conflict*). Selain itu, keterbatasan armada dan dinamika cuaca seringkali memperlambat respons cepat terhadap ancaman. Untuk itu, optimalisasi koordinasi antara satuan, serta peningkatan sistem informasi, menjadi kunci utama dalam kelancaran pelaksanaan OODA Loop oleh Satgas LNU di kawasan ini.

Dukungan sistem informasi dan struktur organisasi yang efisien juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan operasional Satgas LNU. Perpres No. 10 Tahun 2010 mengatur pembagian kewenangan antar satuan dalam pelaksanaan operasi gabungan. Satgas LNU, sebagai ujung tombak taktis, berkoordinasi erat dengan Komando Armada (Koarmada) dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan). Sistem komunikasi yang berbasis jaringan tertutup militer dan command center yang ada di pangkalan laut mendukung pertukaran data secara real-time, sehingga memungkinkan keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat.

Satgas LNU juga mengadaptasi teori strategi militer Carl von Clausewitz yang menyatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Dalam konteks Laut Natuna, kehadiran militer merupakan bagian dari kebijakan diplomasi koersif (*coercive diplomacy*) yang bertujuan mengontrol wilayah yang menjadi sengketa klaim. Hal ini menunjukkan bagaimana TNI AL, melalui Satgas LNU, mengekspresikan "politik melalui kekuatan" dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pertahanan seperti pangkalan laut dan pos pengawasan juga menjadi bagian dari strategi pertahanan yang lebih luas.

Penataan dan pelaksanaan operasional Satgas LNU dalam menjaga kedaulatan negara melibatkan tiga tahap penting: persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Tahap persiapan mencakup berbagai kegiatan seperti pemilihan personel, penyusunan organisasi, dan pembekalan materiil. Satgas LNU mempersiapkan diri dengan matang melalui pelatihan dan perawatan perlengkapan tempur sebelum diberangkatkan ke Natuna. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan patroli, pengawasan, serta pelaksanaan latihan perorangan dan kesenjataan. Keberhasilan Satgas LNU dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kesiapan personel dan material yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pada tahap pengakhiran, Satgas LNU melakukan serah terima tugas dengan Satgas yang baru. Personel dan material yang digunakan selama operasi akan dipulangkan melalui jalur transportasi laut. Evaluasi terhadap operasi ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama penugasan. Laporan purna tugas disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai jalannya operasi dan hasil yang dicapai.

Adaptasi terhadap dinamika yang terjadi di kawasan Natuna menjadi kunci keberhasilan Satgas LNU dalam menjalankan tugasnya. Perubahan pola aktivitas kapal asing, ketegangan di Laut Natuna Utara, dan perubahan musim laut memerlukan pembaruan strategi secara berkelanjutan. Satgas LNU terus memonitor dan menganalisis situasi menggunakan data intelijen yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknologi seperti drone laut dan

sensor otomatis semakin diandalkan untuk memantau wilayah secara lebih efektif dan efisien.

Strategi Satgas LNU juga melibatkan kerja sama lintas lembaga dan antar matra TNI. Kolaborasi antara TNI AL, Bakamla, dan KKP dalam patroli gabungan menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga kedaulatan maritim. Pendekatan ini memperkuat doktrin pertahanan berlapis yang memperhitungkan berbagai faktor, termasuk ancaman internal dan eksternal. Dengan kerja sama ini, Satgas LNU dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi kawasan Natuna.

Evaluasi terhadap efektivitas operasional Satgas LNU dapat dianalisis melalui teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers, yang menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan adaptasi dalam pencapaian tujuan. Indikator utama efektivitas Satgas LNU meliputi kemampuan dalam mencegah pelanggaran wilayah, respon terhadap krisis, serta kesiapsiagaan personel dalam menghadapi tantangan yang muncul. Evaluasi yang rutin akan memastikan bahwa operasi Satgas LNU tetap terfokus pada pencapaian tujuan strategis nasional.

Kesimpulannya, keberhasilan Satgas Marinir LNU dalam menjalankan operasi keamanan laut di Natuna merupakan implementasi dari konsep *sea power* yang multidimensi. Kombinasi antara kehadiran fisik, strategi taktis yang adaptif, serta kerja sama lintas lembaga dan matra TNI menjadikan Satgas Marinir LNU sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di kawasan yang sangat strategis ini.

4. KESIMPULAN

Operasi keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Marinir Laut Natuna Utara (Satgas LNU) merupakan respons konkret terhadap tantangan geopolitik dan ancaman kedaulatan di perairan utara Indonesia. Strategi yang mereka terapkan sangat relevan dengan teori *sea power* Alfred Thayer Mahan, di mana kehadiran dan dominasi laut menjadi instrumen vital untuk mempertahankan kedaulatan. Laut Natuna Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa di Laut Cina Selatan, merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan intensif dan keterlibatan militer aktif. Oleh karena itu, Satgas LNU hadir sebagai garda terdepan yang menjalankan operasi berbasis taktik dan strategi modern. Penempatan pasukan, patroli rutin, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian integral dari pengamanan wilayah ini. Dengan demikian, Satgas LNU tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana operasional, tetapi juga simbol kekuatan negara di perbatasan laut.

Efektivitas Satgas LNU dalam menjalankan operasi keamanan laut dapat dinilai dari kemampuannya mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran wilayah, seperti illegal fishing dan infiltrasi kapal asing. Implementasi teori

OODA Loop (Observe, Orient, Decide, Act) menjadikan respon mereka terhadap ancaman menjadi lebih cepat dan akurat. Pemantauan menggunakan radar, UAV, serta koordinasi intelijen menjadi bagian dari fase observasi yang terintegrasi. Dalam tahap orientasi dan pengambilan keputusan, Satgas LNU mengandalkan SOP TNI dan sistem komunikasi digital yang terhubung dengan komando atas. Proses ini memungkinkan mereka bertindak secara tepat sasaran dalam waktu singkat. Hambatan seperti keterbatasan armada dan cuaca ekstrem diatasi dengan fleksibilitas taktis dan kerja sama antar satuan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas Satgas tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya, tetapi juga pada sistem dan prosedur yang solid.

Dari sisi kebijakan, operasional Satgas LNU dilandasi oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 serta Perpres No. 10 Tahun 2010 yang mengatur struktur organisasi TNI dan distribusi kewenangan di wilayah perbatasan. Kebijakan ini menjadi payung hukum bagi segala tindakan militer yang dilakukan di wilayah strategis seperti Natuna. Instruksi dari Telegram Kasal dan Surat Perintah Komandan Korps Marinir memberikan dasar taktis dalam pelaksanaan operasi harian. Melalui koordinasi dengan Komando Armada dan Pangkogabwilhan, Satgas LNU menjalankan operasi yang sinkron antara level taktis dan strategis. Ini membuktikan bahwa kebijakan pertahanan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dijabarkan dalam tindakan militer yang nyata dan sistematis. Dengan menggabungkan kebijakan dan kemampuan lapangan, Satgas LNU mampu mengubah instrumen hukum menjadi kekuatan pertahanan yang operasional.

Kontribusi Satgas LNU terhadap penguatan postur pertahanan negara sangat signifikan. Mereka tidak hanya bertugas melakukan pengawasan rutin, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam konteks diplomasi regional. Dengan menerapkan konsep *coercive diplomacy*, Satgas LNU menjadi representasi nyata dari upaya negara menegakkan kedaulatan melalui kekuatan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Clausewitz bahwa militer adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Keberadaan mereka di wilayah perbatasan juga mendukung integrasi komando, karena Satgas berperan sebagai penghubung antara pusat dan satuan pelaksana lapangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur militer seperti pos pengawasan dan pangkalan laut di Natuna semakin memperkuat kehadiran fisik negara di kawasan strategis ini.

Operasi Satgas LNU dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Tahap persiapan melibatkan proses seleksi personel, pelatihan, dan penyiapan logistik yang matang. Hal ini penting agar setiap personel memiliki kesiapan fisik dan mental untuk bertugas di wilayah yang menantang. Pada tahap pelaksanaan, patroli laut, pengamatan udara, dan latihan

perorangan dijalankan secara berkala untuk memastikan pengawasan berlangsung efektif. Setelah masa tugas berakhir, tahap pengakhiran dilakukan dengan evaluasi menyeluruh serta serah terima tugas kepada Satgas pengganti. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala dan menentukan perbaikan pada rotasi berikutnya. Dengan siklus ini, Satgas LNU menunjukkan komitmen pada siklus operasional yang terstruktur dan berkelanjutan.

Adaptasi terhadap dinamika lingkungan laut dan geopolitik menjadi kunci utama dalam mempertahankan efektivitas Satgas LNU. Perubahan pola aktivitas kapal asing, ancaman dari konflik regional, dan faktor cuaca memaksa Satgas untuk terus melakukan pembaruan strategi. Mereka memanfaatkan teknologi seperti drone laut dan sistem pengawasan otomatis untuk menjangkau area yang sulit diawasi. Kolaborasi dengan unsur intelijen TNI dan informasi dari nelayan lokal turut memperkuat basis data yang digunakan dalam perencanaan operasi. Adaptasi ini tidak hanya menandai profesionalisme militer, tetapi juga menunjukkan bahwa pertahanan modern harus berbasis data dan analisis yang akurat. Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan menjadi indikator keberhasilan strategi Satgas LNU dalam jangka panjang.

Kerja sama antar instansi seperti TNI AL, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa Satgas LNU tidak bekerja sendiri. Sinergi ini mencerminkan pendekatan pertahanan berlapis yang melibatkan aspek militer, hukum, dan pengawasan sipil. Patroli gabungan dan operasi bersama menjadi bentuk konkret dari integrasi peran dalam menjaga wilayah maritim. Hal ini juga menciptakan kesadaran kolektif bahwa keamanan laut adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya kerja sama ini, efektivitas operasi meningkat karena keterpaduan informasi dan respon yang lebih cepat. Satgas LNU menjadi poros utama dalam orkestrasi berbagai kekuatan negara di wilayah perbatasan. Kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat agar pertahanan maritim Indonesia semakin solid dan adaptif.

Evaluasi efektivitas organisasi Satgas LNU juga dapat dianalisis melalui teori Richard M. Steers, yang menekankan pentingnya efisiensi, adaptabilitas, dan pencapaian tujuan. Satgas dinilai efektif jika mampu merespon ancaman dengan cepat, mengurangi pelanggaran wilayah, dan mempertahankan stabilitas maritim. Keberhasilan juga diukur dari kesiapan personel dan kemampuan material untuk menghadapi kondisi ekstrem di laut. Evaluasi secara periodik penting dilakukan untuk mengukur kinerja dan menentukan langkah strategis selanjutnya. Dengan melakukan evaluasi berbasis teori organisasi, Satgas LNU dapat terus memperbaiki diri dan menyesuaikan strategi dengan dinamika aktual. Hal ini menunjukkan bahwa

pendekatan ilmiah dalam pengukuran efektivitas sangat relevan dalam konteks operasi militer modern.

Secara keseluruhan, Satgas LNU telah menunjukkan kinerja yang solid dan adaptif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di Laut Natuna Utara. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi antara strategi militer berbasis teori, dukungan kebijakan nasional, serta sinergi antar lembaga. Kehadiran mereka di garis depan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam menegakkan hukum dan menghalau ancaman nyata. Peran mereka menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah dan membuktikan eksistensi negara di kawasan perbatasan. Dalam konteks ketegangan regional, operasi Satgas LNU menjadi penegas bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan keberanian untuk menjaga wilayahnya. Dengan terus memperkuat kesiapan dan integrasi, Satgas LNU akan tetap menjadi ujung tombak pertahanan laut Indonesia.

Dengan demikian, operasi keamanan laut oleh Satgas LNU bukan hanya implementasi kebijakan pertahanan, tetapi juga cerminan kematangan strategi maritim Indonesia. Pendekatan berbasis teori *sea power*, *OODA Loop*, dan Clausewitz terbukti dapat diterapkan secara efektif dalam konteks operasional. Evaluasi melalui teori efektivitas organisasi memberi gambaran bahwa operasi Satgas LNU memiliki fondasi konseptual yang kuat. Ke depan, keberhasilan ini perlu dijaga dengan peningkatan kualitas SDM, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), serta perluasan jaringan kerja sama internasional. Operasi Satgas LNU harus terus menjadi contoh keberhasilan pertahanan maritim yang terukur dan profesional. Ketahanan laut Indonesia di kawasan strategis seperti Natuna akan menjadi barometer kekuatan nasional dalam menjaga kedaulatan dan kestabilan kawasan.

5. REFERENSI

- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge.
- Adi, Letda Marinir. 2024. *Wawancara tentang Operasi Satgas LNU dan Pengawasan Maritim*. Natuna.
- Agustino, L., & Sylviana, M. (2022). Perbandingan Penanganan Covid-19 di Indonesia dan Vietnam.
- Alfariqi, A., & Akbar, A. (2024). Safeguarding Maritime Operations through Strategic Shipping Protocols for Enhanced Security. *Procedia of Engineering and Life Science*, 7, 581–585.
- Asdiarti, R., & Abdullah, N. (2023). Strategi Kerja Sama Keamanan Maritim Indonesia-Jepang Dalam Penanganan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 2(1), 1-15.
- ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) (2006). *ASEAN Defense Ministers' Joint Declaration on Regional Security and Cooperation*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Aulia, A., Rohman, M. A., & Baskoro, B. Y. (2021). *Implementasi International Ship and Port Facility Security Code di atas Kapal Floating Storage Offloading (FSO)*. *Jurnal Maritim Malahayati*, 2(1), 40-44.
- Baker, S. (2018). *Strategic Alliances and Global Security*. Routledge.
- Bazeley, Pat, and Kristi Jackson. *Qualitative Data Analysis with NVivo*. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2013.
- Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Boyd, J. (1987). *Aerial Attack Study*. USAF.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Brown, R. (2020). *The Impact of Technology on Maritime Security*. Harvard University Press.
- Budi Hernawan, "Security Governance di Kawasan Perbatasan Maritim Indonesia: Studi Kasus Natuna," *Jurnal Keamanan Nasional* 9, no. 1 (2023): 45–60.
- Bueger, C. (2015). *What is maritime security?* *Marine Policy*, 53, 159-164.
- Burke, L., Reytar, K., Spalding, M., & Perry, A. (2011). *Reefs at risk revisited*. *World Resources Institute*.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Chaniago, Mayor Marinir Afrison Tofik. 2024. *Wawancara tentang Strategi Sea Power dan Implementasi Operasi Militer di Laut Natuna*. Natuna.
- Christensen, V., Coll, M., Buszowski, J., Cheung, W. W., Frölicher, T., Steenbeek, J., ... & Walters, C. J. (2015). *The global ocean is an ecosystem: simulating marine life and fisheries*. *Global Ecology and Biogeography*, 24(5), 507-517.
- Clausewitz, C. von. (1832). *On War* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press.
- Cohen, A. (2018). *Navigating the New World Order: The Global Strategy of the United States*. Princeton University Press.
- Cordner, L., Cordner, L., & Roughley. (2017). *Maritime security risks, vulnerabilities, and cooperation*. *Palgrave Macmillan*.
- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. *Sage Publications*.

- Damayanti, A. (2019). *Indo-Pacific Maritime Cooperation: ASEAN mechanisms on security towards global maritime governance*. Jurnal Global Strategis, 13(1), 1-14.
- Darmawan, L. M. T. P. I. (2018). Menyibak gelombang menuju negara maritim: kajian strategis mewujudkan poros maritim dunia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Dewi, P. (2021). KEPEMIMPINAN. Bypass: PT. Jawa Mediasindo Lestari.
- Francisco Goya, *Military Decision-Making and the OODA Loop*, (Singapore: RSIS Press, 2021).
- Friedman, T. L. (2016). *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. Farrar, Straus and Giroux.
- Guilfoyle, D. (2017). *Maritime law enforcement operations and intelligence in an age of maritime security*.
- Hagmann, J., & Dunn, C. (2008). *Securitization's Neighbourhood: The Politics of Exception in International Relations*. *International Political Sociology*, 2(1), 69–83.
- Hardin, G. (1968). La tragedia de los comunes. *Science*, 162(37), 1243-1248.
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75-91.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Jakarta: Sekretariat Negara, 2010.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- International Hydrographic Organization. *Limits of Oceans and Seas*, Special Publication No. 23, 3rd edition. Monaco: IHO, 1953.
- Kaplan, R. D. (2019). *The Return of Marco Polo's World: War, Strategy, and American Interests in the Twenty-First Century*. Random House.
- KARTIKA, Shanti Dwi. Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2016, 5.2: 143-167.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2023* (Jakarta: KKP, 2024).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Laporan Illegal Fishing di Perairan Natuna*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2017). *Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*.
- Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Telegram No. 676/SOPS/1221 TWU 1214 1909 tentang Rotasi Personel Satgas Kompi Komposit TNI AL. Jakarta, 2021.
- Keputusan Menteri Pertahanan No. 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Sistem Komando Pengendalian Keamanan Laut.
- Klein, N. (2015). *Maritime security* (pp. 14-28). Oxford University Press.
- Komandan Korps Marinir. Surat Perintah No. Sprin/2424/XII/2021 tentang Rotasi Satgas Kompi Komposit TA. 2022. Jakarta, 2021.
- Ksatria, S. P. (2019). Development of maritime logistics system to support marine and fisheries integrated centres in small island and boundary areas. Doctoral dissertation, University of Essex.
- Kurniawan, A., Biasane, D. I., Sinaga, R., Paotonan, C., & Bahri, S. (2023, February). *Synchronization of ship services areas between ports in the Lampa Strait of Natuna*. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2675, No. 1). AIP Publishing.
- Lamy, S. L., & Masker, J. (2016). *Geopolitics of the Sea*. London: Routledge.
- Lee, K. (2019). *International Cooperation in Maritime Security: Challenges and Opportunities*. Cambridge University Press.
- Ifariqi, A., & Akbar, A. (2024). *Safeguarding Maritime Operations through Strategic Shipping Protocols for Enhanced Security*. *Procedia of Engineering and Life Science*, 7, 581-585.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Ling, S. D., Scheibling, R. E., Rassweiler, A., Johnson, C. R., Shears, N., Connell, S. D., ... & Johnson, L. E. (2015). *Global regime shift dynamics of catastrophic sea urchin overgrazing*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 370(1659), 20130269.
- Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. Little, Brown and Company.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.
- Merriam, Sharan B., & Tisdell, Elizabeth J. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2016.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Novianto, T., Syamsudin, H., & Rachmawati, S. (2020). "Dinamika Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara: Kajian Strategi Pertahanan

- Indonesia". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(2), 101–115.
- Panglima Tentara Nasional Indonesia. *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1312/XII/2018 tentang Pembangunan Prioritas Pulau Terluar Tertentu dan Daerah yang Bersifat Strategis*. Jakarta: Mabes TNI, 2018.
- Panglima TNI. *Peraturan Panglima TNI No. 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pertahanan dan Penugasan Kogabwilhan*. Jakarta: Markas Besar TNI, 2020.
- Pasmar 1 Satgas Kompi Komposit Marinir Natuna. *Laporan Purna Tugas Satgas Kompi Komposit Marinir Natuna TA. 2022*. Jakarta: Kemenhan, 2023.
- Paulus, Trena M., and Jessica N. Lester. *Doing Qualitative Research in a Digital World*. London: SAGE Publications, 2016.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Pertahanan No. 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keamanan Laut.
- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.
- Perwita, A. A. B., Ian Montratama, S. E., & MEB, M. S. (2021). *Pengelolaan Pertahanan Perbatasan Maritim Kepulauan Natuna*. Jakad Media Publishing.
- Putri, D., et al. (2024). "Diplomasi Multilateral dalam Menjaga Stabilitas Wilayah Maritim Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional*, 22(1), 77-95.
- Putri, L., Ansori, M., & Syahtaria, H. (2024). *The Role of Maritime Diplomacy in the South China Sea Dispute*. Singapore: Southeast Asian Studies.
- Putri, P. S., Ansori, A., Rudiawan, B., & Syahtaria, M. I. (2024). Implementasi Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Rangka Deteksi Dini Pelanggaran Di Pesisir Garut Jawa Barat. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(6).
- Putri, P. S., et al. (2024). Implementasi Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam Rangka Deteksi Dini Pelanggaran di Pesisir Garut Jawa Barat. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(6).
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2010).
- Robbins, S. P. (2003). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications*. 9th Edition. Prentice Hall.
- Rondi, Letda Marinir. 2024. *Wawancara tentang Strategi Pertahanan di Natuna dan Peran Pos Pantau Satgas LNU*. Natuna.
- Sajidin, M., Saputra, I., & Nofiasari, W. (2023). Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 170-177.
- Saldaña, Johnny. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. 4th ed. London: SAGE Publications, 2021.
- Saraswati, A. L., & Pinatih, N. K. D. A. (2020). Strategi Keamanan Maritim Indonesia terhadap Maritime Piracy di Laut Sulu Tahun 2016.
- Sarjito, I. A., Saputro, I. G. E., & IP, S. (2024). Kebijakan pertahanan negara dalam perspektif global. Indonesia Emas Group.
- Scheler, R. (2020). *The EU in Southeast Asian Security: The Role of External Perceptions*. Routledge.
- SKEP Panglima TNI No. Kep/1312/XII/2018
- Smith, J. (2017). *Climate Change and Maritime Security: A Global Challenge*. Oxford University Press.
- Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur melintasi pandemi covid-19.
- Sprin Dankormar No. 2424/XII/2021. Tentang Pembentukan Satgas Marinir Laut Natuna Utara.
- Steers, Richard M. (1985). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Santa Monica: Goodyear Publishing Company.
- Sudiantara, Mayor Marinir I Made. 2025. *Wawancara tentang Pelaksanaan Operasi Satgas LNU dan Dukungan Operasional TNI AL*. Natuna.
- Sumaila, U. R., et al. (2012). A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies. *Journal of Bioeconomics*, 14(1), 1-14.
- Surat Perintah Komandan Korps Marinir. *Surat Perintah No. Sprin/2424/XII/2021 tentang Pelaksanaan Rotasi Kompi Komposit TNI AL Pangkalan TNI Terintegrasi Setengar Natuna TA. 2022*. Jakarta: Kormar, 2021.
- Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Laut. *Telegram Kasal No. 676/SOPS/1221 TWU 1214 1909 tentang Penyiapan dan Pelaksanaan Rotasi Personel Marinir Satgas Kompi Komposit TNI AL Pangkalan TNI Terintegrasi di Setengar Natuna*. Jakarta: TNI AL, 2021.
- Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi keamanan maritim Indonesia dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah (Studi di Kabupaten Natuna Periode tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 65-89.

- Tanter, R., & Selden, M. (2003). *Asia-Pacific Security: Transnational Challenges to Stability*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Tsuji, T. (2015). *ASEAN's Role in Regional Security: Balancing between Major Powers*. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 2(2), 139-158.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982.
- Wæver, O. (1995). *Securitization and Desecuritization*. In Lipschutz, R. D. (Ed.), *On Security*. New York: Columbia University Press.
- Woolf, Neil H., and Christina Silver. *Qualitative Analysis Using NVivo: The Five-Level QDA Method*. London: Routledge, 2018.
- Yusuf, Mayor Laut (P) Muhamad. 2025. *Wawancara tentang Pengawasan Batas Laut dan Peran TNI AL di Laut Natuna*. Natuna.